

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

HILDA MAYANG SARI, AFRIYANTI, HELMI EDISA

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

hildamayangsasi@gmail.com

afriyanti@gmail.com

helmiedisa@gmail.com

ABSTRACT

The Effect of Regional Original Income (PAD) on Financial performance at the office of the regional finance and revenue agenci in the district of kerinci. To find out how much influence the Regional Original Income (PAD) on Financial Performance at the office of the regional finance and revenue agenci in the district of kerinci). This study analyzed the data using the quantitative method, namely the analysis of Simple Linear Regression, Coefficient of Determination, t Hypothesis Test and Instrument Data Test. The data collection technique used a questionnaire by distributing questionnaires to Twenty Two respondents at the office of the regional finance and revenue agenci in the district of kerinci. The main problem in this study is whether there is a significant influence between the Effect of Regional Original Income (PAD) on Financial Performance at the office of the regional finance and revenue agenci in the district of kerinci. Based on the results of the study, it can be concluded that there is a significant influence between the Regional Original Revenue (PAD) variable on Financial Performance as evidenced by t count $>$ t table $4.636 > 2.085$. While the influence of the Regional Original Income (PAD) variable on Financial Performance) is 51.8%.

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD) on Financial Performance*

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini analisis data menggunakan metode

Kuantitatif yaitu dengan analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis t dan Uji Instrument Data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap 68 Responden pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Pokok masalah dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4,636 > 2,085$. Sedangkan pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan adalah sebesar 51,8%.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan

1.PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Perubahan tidak terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Akibat dari adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu

daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal daridadaerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sentralistis ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah daerah (eksekutif) ke power sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus disikapi dengan mengubah manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen publik, juga terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan publik dari pemerintah kemasyarakatan ataupun pasar.

Demikian juga sebagai konsekuensi reformasi, manajemen publik juga harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan pada proses tindakan administrasi yang meliputi kegiatan: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan pegawai (*staffing*), pengarahan (*directing*), pengawasan (*controlling*), pengaturan (*regulating*), dan penganggaran (*budgeting*) ke orientasi baru yang menekankan pada proses pembuatan kebijakan dan tindakan pelaksanaan yang meliputi kegiatan: analisis kebijakan (*policy analysis*), manajemen keuangan (*financial management*), manajemen sumber daya manusia (*human resources management*), manajemen informasi (*information management*), dan hubungan keluar (*external relation*).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesiapada umumnya dan Kabupaten kerinci pada khususnya disamping itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam public servicedi daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada peraturan pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan keputusan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam

penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintah sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2005).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dikemukakan atas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggungjawab.
2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD
3. Daerah dalam bentuk dana cadangan
4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain
5. Pokok-pokok pengelo keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kerja.

Anggaran dengan pendekatan kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000)

Otonomi yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonom daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun kenyataan di pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. Dengan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimilikinya. Sumber pendapatan asli daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya (Halim, 2012).

Dana yang besumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dimana dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat berperan dalam meningkatkan kemandirian daerah tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mandiri kinerja pemerintah daerah semakin baik (Florida, 2007). Kinerja

keuangan merupakan suatu kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah atau PAD.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2018-2020

No	Jenis Pendapatan	2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Daerah	80 481,17	42 421,50	81 737,44
2	Pajak Daerah	13 559,75	13 887,17	11 719,26
3	Retribusi Daerah	2 879,36	2 815,33	2 972,32
4	Pendapatan Yang Dipisahkan	8 295,78	8 779,01	8 962,12
5	Lain-Lain PAD Yang Sah	55 746,43	16 939,01	58 083,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat terjadinya penurunan dratis untuk PAD pada tahun 2019 dan kembali stabil di tahun 2020, Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan, pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahkan tugas untuk menjalankan roda pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, serta perbedaan hasil yang diperoleh beberapa penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditemukan permasalahan yang ada yaitu :

1. Apakah terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci ?

2. Seberapa Besarkah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci ?

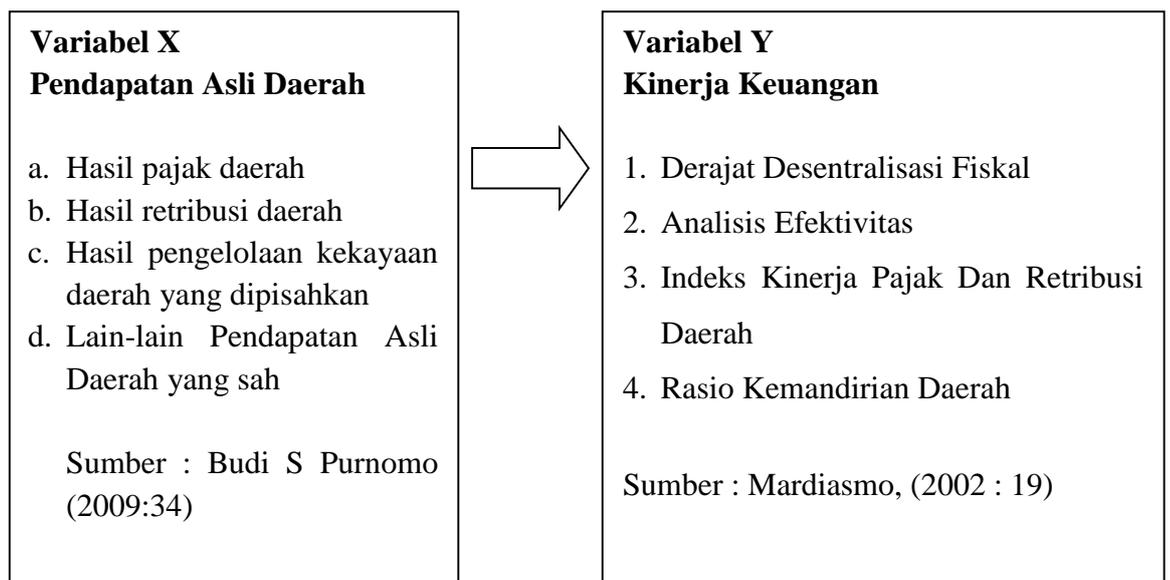
2.TINJAUAN PUSTAKA

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isdijoso, 2002).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Isdijoso(2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Sugiono (2019:55) kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau penjumlahan. Data-data kuantitatif inilah yang kemudian bisa diolah dengan teknik statistik. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dengan melakukan perhitungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Study Pustaka
3. Kuesioner
4. Dokumentasi

Metode Analisa Data

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2011:106), Uji Validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item berupa pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu. Uji Validitas adalah mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabelnya.

Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan melakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 (.=5%), yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Beberapa metode uji validitas yang sering digunakan dengan SPSS adalah *Korelasi Pearson* atau juga disebut *Korelasi Product Moment* yang dikembangkan oleh *Karl Pearson*. Metode kedua adalah *Corrected item-Total Correlation*. Hasil validitasnya dapat diketahui pada semua item pertanyaan, jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2011:137), Uji reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Metode *Cronbach Alpha* dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS (*statistic programme for social science*). Uji Reliabilitas digunakan berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil pengukuran. Hal ini sangat penting sekali supaya kuesioner yang kita gunakan sebagai alat pengumpul data benar-benar dapat dipercaya. Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama (*ajeg*) pada saat dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap.

Secara singkat uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan sebuah kuesioner. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbachis Alpha* dan *Split Half Spearman Brown*.

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrumen penelitian dengan melihat korelasi koefisien cronbach alfa untuk semua kuesioner dari setiap variabel. Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alfa $> 0,6$.(Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel.

2. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran atau distribusi data dalam variabel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan patokan yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Sugiyono (2012,137).

2. Uji Linearitas

Uji Linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikansi memiliki hubungan yang linear atau tidak. Dengan demikian korelasi yang baik terjadi apabila terdapat hubungan yang linear antara *Variabel Independent* dengan *Variabel Dependent*. Syarat pengambilan keputusan pada uji linearitas adalah apabila dua variabel mempunyai nilai signifikansi (*Sig. Deviation from Linearity*) lebih besar dari 0,05 maka dikatakan kedua variabel adalah linear.

3. Unit analisis

Menurut Hamid (2004:184) unit analisis adalah satuan yang di teliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Interprestasi Data

1. Skala Likert

Menurut Sugiono (2009:93) *Skalalikert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Setiap jawaban dari responden diklasifikasikan sebagai berikut:

SS	= Sangat Setuju	diberi skor	4
ST	= Setuju	diberi skor	3
TS	= Tidak Setuju	diberi skor	2
STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi skor	1

4. Regresi Linear Sederhana

Sugiyono (2019:123) Analisis regresi linear sederhana adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh fungsi atau pengaruh kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan penyelesaian menggunakan SPSS versi 17.00. Model persamaan untuk analisa regresi berganda adalah :

$$Y = a + bx + e \dots\dots\dots 1$$

Keterangan

- Y : Kinerja Keuangan
- b : Koefisien regresi
- X : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- a : Konstanta
- e : Standard Error

5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots 2$$

Keterangan :

- KD : Koefisien Determinasi
- r : Koefisien Korelasi

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk membuktikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dihitung dengan rumus uji t, sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{r\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots 3$$

Keterangan :

- T hit : Nilai
- r : Nilai Koefisien Korelasi
- n : Jumlah Sampel

Dengan taraf signifikan $5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi), maka dilakukan uji dua sisi. Selanjutnya membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu :

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 terima dan H_a ditolak, artinya tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Instrumen Data

1. Uji Validitas

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Variabel (X)
Pendapatan Asli Daerah

No	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Ket
1.	X1	0,788	0,444	Valid
2.	X2	0,661	0,444	Valid
3.	X3	0,719	0,444	Valid
4.	X4	0,845	0,444	Valid
5.	X5	0,797	0,444	Valid
6.	X6	0,868	0,444	Valid
7.	X7	0,892	0,444	Valid
8.	X8	0,915	0,444	Valid
9.	X9	0,485	0,444	Valid
10.	X10	0,745	0,444	Valid
11.	X11	0,874	0,444	Valid
12.	X12	0,874	0,444	Valid

Sumber : Output Pengolahan SPSS Versi 17

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki status valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,444 dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Variabel (Y)
Kinerja Keuangan

No	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Ket
1.	Y1	0,569	0,444	Valid
2.	Y2	0,933	0,444	Valid
3.	Y3	0,640	0,444	Valid
4.	Y4	0,630	0,444	Valid
5.	Y5	0,614	0,444	Valid
6.	Y6	0,832	0,444	Valid
7.	Y7	0,630	0,444	Valid
8.	Y8	0,933	0,444	Valid
9.	Y9	0,933	0,444	Valid

10.	Y10	0,550	0,444	Valid
11.	Y11	0,839	0,444	Valid
12.	Y12	0,771	0,444	Valid
13.	Y13	0,933	0,444	Valid
14.	Y14	0,869	0,444	Valid
15.	Y15	0,652	0,444	Valid

Sumber : Output Pengolahan SPSS Versi 17

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kinerja Keuangan memiliki status valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,444 dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel Pendapatan Asli Daerah dengan variabel Kinerja Keuangan. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu α sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari $> 0,60$ jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena $< 0,60$. Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (X)
Pendapatan Asli Daerah
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,941	68

Berdasarkan tabel4.3 diatas diketahui bahwa hasil dari uji reliabilitas pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu $0,941 > 0,60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner varibel Pendapatan Asli Daerah (X) dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (Y)
Kinerja Keuangan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,948	15

Pada tabel 4.4 diatas Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Kinerja Keuangan (Y) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi

dari pada nilai dasar yaitu $0,948 > 0,60$ hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Kinerja Keuangan (Y) dinyatakan reliabel atau bisa dipercaya.

Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah(X) Terhadap Kinerja
Keuangan (Y)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Laporan Keuangan	Perencanaan Anggaran
N		68	68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	2,90649402	5,00142571
Most Extreme Differences	Absolute	,065	,068
	Positive	,036	,055
	Negative	-,065	-,068
Test Statistic		,065	,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c	,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Apabila nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi data dapat dikatakan normal, sebaliknya jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi dengan normal.

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa hasil Uji Normalitas menunjukkan level signifikan lebih besar dari α ($\alpha=0,05$) yaitu $0,200 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Linearitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Linearitas Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah(X) Terhadap Kinerja
Keuangan (Y)
ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pendapatan Asli Daerah * Kinerja Aparatur Sipil Negara	Between (Combined) Groups	1866,913	8	81,170	4,702	,000
	Linearity	1182,841	1	1182,841	68,514	,000
	Deviation from Linearity	684,073	7	31,094	1,801	,036
Within Groups		1104,905	15	17,264		
Total		2971,818	21			

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Sig. Deviation from Linearity* adalah 0,036. Berarti $0,036 < 0,05$ yang mana menunjukkan H_0

diterima dan H_0 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh linear antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian asumsi linearitas tidak terpenuhi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap Kinerja Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

1. Analisis Regresi linier Sederhana

Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semula. Untuk mengetahui hasil analisis dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Persamaan Regresi Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (X) Terhadap Kinerja
Keuangan (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,891	8,699		2,287	,033
Pendapatan Asli Daerah	,898	,194	,720	4,636	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari tabel 4.7 diatas maka diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 19,891 + 0,898 X$$

Konstanta sebesar 19,891 menyatakan bahwa jika dianggap tidak ada nilai dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X) maka Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci sebesar 19,891, Koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci adalah positif sebesar 0,898. Maksudnya semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, Maka Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci akan semakin meningkat.

2. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dengan variabel bebas (*independent*) Pendapatan Asli Daerah

(X) dan variabel terikat (*dependent*) Kinerja Keuangan (Y) Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Besarnya Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (X) Terhadap Kinerja
Keuangan (Y)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 ^a	,518	,494	3,78666

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 4.8 diatas, nilai *r square* sebesar 0,518 yang maksudnya variabel Pengaruh Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerincisebesar 51,8% sementara sisanya sebesar 48,2% (100% - 51,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji t Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X)
Terhadap Kinerja Keuangan (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,891	8,699		2,287	,033
Pendapatan Asli Daerah	,898	,194	,720	4,636	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,636 > 1,997) Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

Pembahasan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten kerinci berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan perhitungan dengan menggunakan data SPSS seperti Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Prasyarat Analisis, Analisis Linier Sederhana, Uji Normalitas, Uji Linearitas, Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis t.

1. Pembahasan Pendapatan Asli Daerah X

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai signifikan dari pendapatan asli daerah Konstanta sebesar 19,891 menyatakan bahwa jika dianggap tidak ada nilai dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X) maka Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci sebesar 19,891, Koefisien Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci adalah positif sebesar 0,898. Maksudnya semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, Maka Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci akan semakin meningkat.

Hasil Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cherry Dhia Wenny (2012) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Sampel yang digunakan yaitu, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan pada pemerintah.

2. Pembahasan Kinerja Keuangan Y

Berdasarkan Variabel Y Kinerja Keuangan dengan 15 item pernyataan mengenai kinerja Keuangan, diketahui bahwa yang menunjukkan jawaban paling dominan terdapat pada item 1 kualitas atau mengerjakan sesuatu dengan positif tentang kemampuan atau profesi yang telah di amanatkan sesuai dengan bidang masing-masing dengan persentase 51,8,% sebanyak 41 responden dan sisanya dari faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan oleh peneliti.

Hasil Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cherry Dhia Wenny (2012) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Sampel yang digunakan yaitu, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan pada pemerintah.

5.SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan analisis bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yaitu dapat dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ $4,636 > 1,997$.
2. Besarnya pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 51,8% sedangkan sisanya sebesar 48,2% di jelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

2.Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan kerjasama dan pelibatan stakeholder dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah .
2. Perlu adanya pengembangan penggalan potensi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten pada bidang pajak pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci lebih baik dari tahun yang sebelumnya.
4. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pemungut dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
5. Penguatan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah serta terhadap Sumber Daya Manusia aparatur pemungunya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- As'ad, 2011, *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*, Psikologi industri Edisi IV, Yokyakarta.
- Budi S Purnomo, 2009, *Obligasi Daerah* Alfabeta, Bandung
- Dian N . 2008. *Hukum Dagang*.
- Desak Nyoman Yulia Astuti. 2016. *Metode Penelitian Pnegindraan Jauh*.
- Eka Sintala. 2014. *Kemandirian Kinerja Keuangan*. Aksara Baru, Jakarta.
- Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah Sektor Publik*.
- Halim dan Iqbal. 2012. *Pengelolaan Potensi Daerah*. Yokyakarta Paradikma.
- Hamidi, 2004 *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi 2004/2005, BPFE, Yogyakarta.
- Havid Sularso. 2011. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Indra Bastian. 2001. *Jurnal Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Isdijoso. 2002. *Annual Report Laporan Tahunan*. Alfabeta, Bandung.

- Maimunah. 2006. *Perkembangan Akutansi Sektor Publik*. Ilmu Pemerintahan Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo 2018, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*
- Mahmudi . 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakart, Ghalia Indonesia
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pebi Julianto. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Program Satu milyar Satu kecamatan (Samisake) di kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi jambi tahun 2014*. OSF Preprints. Jakarta.
- Pebi Julianto. 2021. *Menciptakan Smart ASN menuju 4.0 di Kantor Camat Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi, dan Buku Konsultasi*. 2021. Sungai Penuh. STIA-NUSA.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ela Jauvani. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta Rajawali Per
- Ridwan 2012, *Pengantar Statistika Sosial*, Cetakan ke-3, Bandung : Alfabeta
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Mandar Maju Bandung*.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu, Jakarta. Indonesia.
- Sugiyono 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*, Alfabeta Bandung
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Kinerja Keuangan*. Rajawali Jakarta.
- Tika. 2006. *Budaya Organisasi, dan peningkatan Kinerja Perusahaan*. Yogyakarta : Andi Ofset

Sumber-Sumber Lain :

- PP Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Kerinci No 30 Tahun 2020
- Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan
- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah No 66-65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah